

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Indikator Dimensi Keterlibatan Dalam Proses Perencanaan

a. Keterlibatan dalam Tahapan Perencanaan

LPM Desa Lengkosambi Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam keterlibatan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. Mereka secara aktif terlibat dalam sosialisasi, pembentukan tim penyusun dokumen RKPDDes dan RPJMDes, serta pengumpulan data dasar desa. Peran ini sangat krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa, memastikan bahwa proses perencanaan memiliki fondasi partisipatif yang kuat. Upaya ini mencerminkan dedikasi LPM untuk menjadikan perencanaan pembangunan desa lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan terkait kualitas dan kelengkapan data yang dihimpun, seringkali akibat keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Hal ini menyebabkan pemetaan potensi dan permasalahan desa belum sepenuhnya optimal. Selain itu, aspirasi dari kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan masyarakat miskin masih belum terakomodasi secara merata, menunjukkan perlunya peningkatan inklusivitas. Koordinasi yang belum maksimal dengan BPD dan perangkat desa juga menghambat penyaluran aspirasi yang adil, sehingga potensi ketimpangan representasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi LPM.

b. Intensitas dan Kontinuitas Keterlibatan

Intensitas keterlibatan LPM dalam forum perencanaan, khususnya di awal tahapan seperti sosialisasi dan pengumpulan data, relatif tinggi dan menunjukkan komitmen yang baik dari pengurus inti. Kehadiran mereka yang konsisten dalam agenda-agenda penting ini menjadi indikator positif bahwa LPM serius dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator partisipasi

masyarakat. Hal ini menciptakan fondasi awal yang baik untuk proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak.

Namun, keberlanjutan partisipasi menjadi tantangan tersendiri. Keterlibatan anggota biasa LPM cenderung fluktuatif dan kurang konsisten, terutama ketika memasuki tahapan yang lebih teknis seperti penyusunan dokumen dan evaluasi. Motivasi yang tidak merata serta keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi perencanaan masih sangat terbatas, sehingga proses perencanaan belum sepenuhnya inklusif dari awal hingga akhir.

c. Kualitas Kontribusi

LPM menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi masalah utama masyarakat dan mengajukan usulan program yang relevan. Analisis masalah yang mereka sampaikan umumnya cukup mendalam dan didukung oleh observasi lapangan terkait isu-isu vital seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan pemahaman LPM terhadap kebutuhan riil masyarakat, menjadikan usulan mereka relevan dengan kondisi lapangan.

Meskipun demikian, usulan program yang diajukan seringkali kurang inovatif dan cenderung mengulang program yang sudah ada sebelumnya, sehingga minim pembaruan signifikan. Kualitas data pendukung usulan juga perlu ditingkatkan agar lebih meyakinkan bagi pengambil keputusan. Selain itu, kemampuan advokasi dan negosiasi anggota LPM masih perlu diasah untuk memastikan usulan mereka lebih mudah diterima dan diimplementasikan, terutama jika berhadapan dengan keterbatasan anggaran atau prioritas yang berbeda.

d. Representativitas Keterlibatan

LPM Desa Lengkosambi Timur telah berupaya melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan warga dari seluruh dusun, dalam proses perencanaan. Upaya ini merupakan langkah positif untuk memastikan beragam suara dan

perspektif terwakili, mendorong terciptanya perencanaan yang lebih inklusif dan holistik. Konsultasi dengan kelompok rentan juga sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari komitmen ini.

Namun, dalam praktiknya, keterwakilan kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin masih kurang optimal. Keterbatasan akses, komunikasi, dan jaringan menjadi kendala utama dalam menjangkau kelompok-kelompok ini, menyebabkan aspirasi mereka kurang terdengar secara efektif. Diperlukan strategi partisipasi yang lebih proaktif dan inklusif, serta penguatan kapasitas LPM, untuk memastikan bahwa representasi dalam setiap tahapan perencanaan benar-benar adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.1.2. Indikator Dimensi Mekanisme Partisipasi

a. Struktur dan Jalur Komunikasi

Struktur dan jalur komunikasi antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat di Desa Lengkosambi Timur sudah terbangun melalui forum-forum resmi seperti rapat rutin dan musyawarah desa, serta interaksi informal. Adanya hierarki penyampaian informasi di LPM juga menunjukkan adanya upaya untuk mengatur alur komunikasi. Ini menjadi fondasi dasar yang penting untuk mendukung proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Namun, efektivitas jalur komunikasi masih menghadapi kendala. Informasi dari pengurus inti ke anggota di tingkat bawah seringkali tidak sampai secara utuh, menimbulkan miskomunikasi. Mekanisme umpan balik dari masyarakat belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi masih sangat terbatas, sehingga penyebaran informasi belum merata. Koordinasi horizontal antar lembaga pemberdayaan juga masih perlu ditingkatkan agar sinergi program lebih maksimal.

b. Proses Pengambilan Keputusan Internal

Proses pengambilan keputusan internal di LPM Desa Lengkosambi Timur telah mengadopsi prinsip musyawarah sebagai metode utama. Rapat internal rutin diadakan sebelum forum perencanaan desa untuk membahas dan menyusun usulan, memberikan ruang bagi anggota untuk berdiskusi. Dokumentasi hasil rapat dalam bentuk notulen juga sudah dilakukan, menunjukkan adanya upaya akuntabilitas internal dalam setiap keputusan yang diambil.

Meskipun demikian, dominasi pengurus inti dalam pengambilan keputusan masih terasa, sehingga partisipasi anggota biasa belum maksimal. Penggunaan sistem voting jarang diterapkan, dan transparansi terhadap hasil keputusan masih perlu ditingkatkan karena informasi tidak selalu tersebar merata kepada semua anggota. Kurangnya keterbukaan ini berpotensi mengurangi rasa memiliki dan motivasi partisipasi anggota dalam proses perencanaan.

c. Metode Penyampaian Aspirasi

LPM mengandalkan metode penyampaian aspirasi secara lisan dalam forum resmi dan melalui proposal tertulis, dengan pendekatan dialogis yang mengutamakan musyawarah. Pendekatan ini menciptakan suasana kondusif dan harmonis, memungkinkan diskusi terbuka tanpa konfrontasi berlebihan. Upaya lobbying informal oleh pengurus inti juga dilakukan untuk memperkuat posisi usulan di hadapan pihak berwenang.

Namun, terdapat keterbatasan dalam variasi media komunikasi yang digunakan, seperti minimnya pemanfaatan materi audio-visual atau infografis, yang membuat presentasi kurang menarik dan meyakinkan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran aspirasi juga masih sangat terbatas. Kurangnya pelatihan dalam teknik presentasi dan advokasi juga menghambat LPM dalam menyajikan aspirasi secara terstruktur dan didukung data kuat, yang penting untuk mempengaruhi pengambil keputusan.

d. Sistem Monitoring dan Tindak Lanjut

LPM telah berupaya melakukan monitoring dan tindak lanjut terhadap tahapan perencanaan pembangunan desa. Upaya ini mencakup pencatatan progres kegiatan dan pendokumentasian hasil pertemuan, menunjukkan adanya komitmen terhadap akuntabilitas internal. Umpan balik dari masyarakat mulai diperhatikan melalui forum diskusi, dan hasil monitoring dilaporkan secara berkala kepada pemerintah desa serta BPD.

Namun, sistem monitoring ini belum berjalan secara rutin dan sistematis, sehingga pengawasan terhadap tahapan perencanaan seringkali bersifat insidental. Mekanisme umpan balik dari masyarakat belum optimal, dan pelaporan hasil monitoring serta evaluasi seringkali kurang transparan. Mekanisme koreksi dan perbaikan strategi perencanaan belum menjadi budaya yang kuat, dan dokumentasi pembelajaran masih terbatas, menghambat peningkatan berkelanjutan dalam proses perencanaan.

6.2 Saran

Secara umum, LPM Desa Lengkosambi Timur telah menunjukkan komitmen dan upaya signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Untuk mengoptimalkan peran strategis ini, LPM perlu fokus pada peningkatan kapasitas internal dan penguatan mekanisme partisipasi. Hal ini mencakup pelatihan intensif bagi anggota LPM dalam analisis masalah yang inovatif, teknik presentasi yang menarik, dan kemampuan advokasi yang persuasif, didukung dengan data yang kuat. Bersamaan dengan itu, LPM harus memperluas jangkauan representasi dengan strategi proaktif untuk melibatkan kelompok marginal dan memastikan aspirasi mereka terakomodasi secara adil. Penggunaan teknologi informasi juga harus dioptimalkan tidak hanya untuk komunikasi internal, tetapi juga untuk penyebaran informasi yang transparan dan platform umpan balik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan harus menjadi prioritas utama. Ini berarti meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan internal, memastikan semua anggota dan masyarakat memiliki akses terhadap hasil keputusan, serta mengembangkan sistem monitoring dan tindak lanjut yang lebih terstruktur dan rutin. Dengan demikian, setiap tahap perencanaan dapat diawasi secara efektif, dan umpan balik masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Membangun budaya refleksi dan pembelajaran dari setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun tantangan, akan memungkinkan LPM untuk terus beradaptasi dan memperbaiki strateginya, menjadikan partisipasi masyarakat di Desa Lengkosambi Timur lebih inklusif, responsif, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.